BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ideologi merupakan seperangkat sistem nilai dasar yang komprehensif dan mendalam yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidupnya (Fadilah, 2019, h.68). Ideologi menentukan eksistensi suatu negara, yang membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuan dan cita-citanya (Suryana & Kaswan, 2015, h.83). Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang paling cocok untuk menjalankan sistem negara Republik Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai pedoman moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar ancaman yang datang kepada bangsa dapat segera dicegah.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh globalisasi dan teknologi, menyebabkan banyak pemahaman dan pengaruh luar masuk ke Indonesia dengan mudahnya (Faisal, 2021, h.1). Ideologi Pancasila dipertanyakan ketahanannya ketika dunia masuk pada era globalisasi dimana banyaknya ideologi luar masuk ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Hal ini tentunya akan sedikit banyak memberi dampak negatif pada masyarakat Indonesia kedepan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi global inilah yang menjadi peluang bagi berkembangnya ideologi kapitalisme (liberalisme) (Eko Handoyo, Rahmat Petuguran, 2018, h.188).

Paham liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu ini bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila. Contohnya penggunaan narkoba serta banyaknya kasus LGBT dikalangan masyarakat indonesia yang merupakan pengaruh dari liberalisme yang menuntut kebebasan individu. Oleh karena itu penting bagi masyarakat khususnya generasi muda yang merupakan penerus bangsa untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa.

Wawasan kebangsaaan juga penting untuk di perhatikan secara khusus. Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya (Suhady & Sinaga, 2006, h.1). Wawasan kebangsaan menjadi pandangan bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri dan lingkungan dalam mengekspresikan jati diri bangsa dalam tatanan kehidupan dunia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Yuniarto, 2021, h.3).

Wawasan kebangsaan yang berkembang dan mengkristal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuknya negara ini oleh bangsa Indonesia. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang

pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia (Suhady & Sinaga, 2006, h.21).

Perkembangan zaman dapat merubah segalanya termasuk kepribadian suatu bangsa yang telah tertanam setelah bertahun tahun bahkan berabad abad lamanya. Perubahan itu berasal dari berbagai penyebab, salah satunya yaitu dari efek globalisasi yang telah berkembang pesat di seluruh mancanegara (Sembiring et al., 2017, h.181). Hal ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia. Pergaulan antar bangsa yang semakin ketat dan kental akan menghasilkan beberapa proses yaitu akulturasi, saling meniru, saling mempengaruhi, bahkan dapat menimbulkan primodialisme (beranggapan bahwa bangsanya yang terbaik diantara bangsa lain) sehingga diperlukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sebagai warga negara.

Berkaca pada perjalanan Kalimantan Barat banyak konflik yang bernuansa SARA. Dapat dilihat salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat di Kalimantan Barat Pelaku inisial N (35) yang merupakan warga Kabupaten Landak yang melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pria tersebut mengunggah komentar berisi ujaran kebencian terkait SARA di Facebook, unggahan komentar dari pria tersebut berisi ujaran kebencian terhadap golongan agama tertentu (iNewsKalbar.id. 2021).

Selain itu, tindakan anarkis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga sempat terjadi di kabupaten sintang, dimana sebanyak 200 orang merusak tempat ibadah milik anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), tidak hanya merusak tempat ibadah, massa juga membakar bangunan di dekat tempat ibadah yang ada di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak tersebut. Peristiwa penyerangan warga Ahmadiyah tersebut menjadi bukti nyata hilangnya rasa saling menghargai dan menghormati keberagaman (Kompas.com, 2021).

Melihat dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu usaha untuk membangun spirit nasionalisme yang selama ini telah mengalami kemunduran akibat konflik SARA yang menumbuhkan paham kelompok ekstrim kanan maupun kiri, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga persoalan kebangsaan seperti konflik etnis, agama serta permasalahan dalam bentuk apapun bisa dengan mudah teratasi.

Dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk sebuah organisasi perangkat daerah yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang terus menerus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah.

Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia, yang berada di pulau Kalimantan dengan ibu kota yang berada di kota Pontianak. Daerah Kalimantan Barat dihuni oleh penduduk asli Dayak dan aneka ragam suku bangsa. Suku bangsa dominan besar yaitu Dayak, Melayu dan Tionghoa, yang melebihi 90% penduduk Kalimantan Barat. Suku bangsa lainnya antara lain Bugis, Jawa, Madura, Minangkabau, Sunda, Batak dan lain-lain yang jumlahnya dibawah 10%. Selain itu terdapat pula bahasa-bahasa daerah yang juga banyak dipakai seperti Bahasa Melayu dan beragam jenis Bahasa Dayak. Menurut penelitian Institut Dayakologi terdapat 188 dialek yang dituturkan oleh suku Dayak dan Bahasa Tionghoa seperti Tiochiu dan Khek/hakka. 60,2% penduduk Kalimantan Barat beragama Islam, 22,14% Katolik, 11,58% Kristen, dan 5,73% beragama Buddha.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Pasal 4 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi Kalimantan barat dan tugas yang diserahkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi terkait pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan yakni:

a. perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik
b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan observasi awal diperoleh informasi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat memiliki program-program kerja terkait pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Melalui program tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat ikut berkontribusi dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat di Kalimantan Barat. Berangkat dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah umum dalam penelitian ini yakni “Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat”.

Untuk memberikan arah pelaksanaan kegiatan, maka masalah di atas difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat?
4. Bagaimana upaya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam menyikapi hambatan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.
2. Proses pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina. ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.
4. Upaya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam menyikapi hambatan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Domain kurikuler yakni konsep dan praktek PPKn yang berkembang di organisasi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan program kerja selanjutnya. Khususnya dalam program yang berkaitan dengan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi wahana pengetahuan bagi masyarakat tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan dampak positif terkait pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya. Baik sebagai reprahasi maupun revisi, hasil penelitan ini dapat menjadi alat peneliti dalam mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti memperjelas ruang lingkup penelitian yang dituangkan dalam fokus penelitian dan operasional konsep dibawah ini :

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat".

Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

a. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.

b. Pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.

c. Faktor-faktor mendukung dan menghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat.

d. Upaya kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam menyikapi hambatan yang terjadi.

2. Operasional Konsep

Peneliti melakukan operasional konsep karena untuk menghindari perbedaan dalam penafsiran antara penafsiran peneliti dengan penafsiran pembaca terhadap istilah dari makna yang akan digunakan pada penelitian, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi

Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Peraturan (BPIP) (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022) pembinaan ideologi pancasila adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembinaan ideologi pancasila yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun kegiatan yang dimaksud adalah: kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila, pusat pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan forum pembaruan kebangsaan dan perayaan hari besar nasional.

c. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Menurut sunarso (dalam Utami & Cahyono, 2019, h.88) Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara memandang tentang jati diri bangsa dan lingkungannya, esensinya ialah bagaimana bangsa Indonesia mampu memanfaatkan berbagai kondisi yang ada baik dari segi geografis, kondisi sosial, serta sejarah dalam mencapai suatu tujuan nasional.

Pembinaan Wawasan kebangsaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi kalimantan Barat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar cara pandang masyarakat tentang diri dan lingkungannya selalu mengutamakan pesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kegiatan yang dimaksud adalah: kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila, pusat pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan forum pembaruan kebangsaan dan perayaan hari besar nasional.

d. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ada di Kota Pontianak dan pernah menjadi peserta pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat terkait

dengan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat.